



**PUTUSAN**  
**Nomor 425 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jatiwangi, Nomor 1, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**, tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 12, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo, Nomor 12, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/G.TUN/SET.BAPEK/2017, tanggal 15 Juni 2017;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 Tahun 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH, NIP 19661028 199203 2 002 tanggal 20 Desember 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 Tahun 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH, NIP 19661028 199203 2 002 tanggal 20 Desember 2016;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 94/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 12 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 19/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Maret 2018 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 29 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan Kasasi;
2. Menyatakan menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 19/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 22 Februari 2018;
4. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 94/G/2017/PTUN.JKT tanggal 12 Oktober 2017;
5. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 171/KPTS/BAPEK/216 Tahun 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama drg. Wahyu Sulistianingsih, MPHM;
6. Mewajibkan pada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian No. 171/KPTS/BAPEK/216 Tahun 2016 Tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama drg. Wahyu Sulistianingsih, MPHM;
7. Mewajibkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/125/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Juni 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2018



Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa sudah benar karena Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun oleh karenanya melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya mengatur bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan dan apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua, apabila pada tanggal pemeriksaan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan, sehingga dalam sengketa *a quo*, dengan telah dilakukannya pemanggilan sampai tiga kali kepada Penggugat tetapi yang bersangkutan tidak hadir, maka pemeriksaan tanpa hadirnya Penggugat dan penjatuhan hukuman disiplin oleh Menteri Kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah



Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPH.M;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 425 K/TUN/2018